



LKjIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2018**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018. LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP .

Adapun tujuan penyusunan LkjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LkjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transpransi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Boyolali, Januari 2019



DAFTAR ISI

halaman

HALAMN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan LkjlP	1
1.2. Gambaran Umum	3
1.2.1. Organisasi Perangkat Daerah	3
1.2.2. Gambaran Umum	3
1.2.3. Aspek strategis dan Permasalahan utama	10
1.3. Sistematika Penyusunan LkjlP	13
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategik	14
2.2. Perjanjian Kinerja	23
BAB. III. AKUNTANSI KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2. Realisasi Keuangan	34
BAB. IV. PENUTUP	37
4.1. Simpulan	37
4.2. Saran dan Tindak Lanjut	38
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021	
2. Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018	
3. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018	

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar. 1 Struktur Organisasi BPBD	5

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel. 1 Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin	6
Tabel. 2 Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan / Eslon	6
Tabel. 3 Komposisi pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan	7
Tabel. 4 Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel. 5 Komposisi non PNS	7
Tabel. 6 Sarana dan pra saranan umum	8
Tabel. 7 Sarana dan pra sarana khusus	8
Tabel. 8 Rencana strategis tahun 2016 -2021 BPBD Kab.Boyolali	17
Tabel. 9 Rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2018	23
Tabel. 10 Perjanjian kinerja BPBD Kab.Boyolali Tahun 2018	24
Tabel. 11 Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPBD	26
Tabel. 12 Realisasi Anggaran Tahun 2018	34

DAFTAR LAMPIRAN

1	Tabel Renstra Tahun 2016-2021
2	IKU Tahun 2016 - 2021
3	RKT Tahun 2018
4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
5	Pengukuran Kinerja Tahun 2018
6	Piagam Penghargaan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu Tahun 2016 s/d 2021 secara bertahap bermaksud mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, hal tersebut sesuai dengan visi Boyolali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 s/d 2021 yang mengacu pada visi Bupati Boyolali yaitu **Kabupaten Boyolali yang Pro Investasi Maju dan sejahtera**, dan misi yang ingin diwujudkan dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel, yaitu misi nomor 3 “ **Boyolali Bersih, berintegritas, dan Sejahtera**”.

Guna mewujudkan visi dan Misi dimaksud, maka **tujuan utama adalah** Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial, yang dijabarkan *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali* sbb :

1. Mewujudkan Pedoman Penanggulangan Bencana yang memadahi
2. Terselenggaranya PB yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;
3. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
4. terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir;
5. Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam **RPJMD Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial**, dengan didukung tujuh indikator / sasaran BPBD sbb:

- | | | |
|-------------|---|---|
| Indikator 1 | : | <i>Peningkatan kebijakan dan kelembagaan</i> |
| Indikator 2 | : | <i>Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu</i> |
| Indikator 3 | : | <i>Peningkatan sistem informasi diklat dan logistik</i> |
| Indikator 4 | : | <i>Peningkatan penanganan tematik kawasan rawan bencana</i> |
| Indikator 5 | : | <i>Effektifitas pencegahan dan mitigasi bencana</i> |
| Indikator 6 | : | Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; |
| Indikator 7 | : | Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana |

Guna mencapai tujuan sasaran yang juga merupakan tujuh indikator sasaran, pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 5 program utama dan 38 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.223.239.000,-.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja terhadap 7 Indikator tersebut masing-masing tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Dalam pencapaian Indikator 1 yaitu *Peningkatan kebijakan dan kelembagaan* , capaian kinerja kegiatannya dengan kualifikasi baik atau tercapai 93,61%.
2. Dalam pencapaian Indikator 2 yaitu *Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu* , capaian kinerja kegiatannya dengan kualifikasi amat baik atau tercapai 107,22 %.
3. Dalam pencapaian Indikator 3 yaitu *Peningkatan sistem informasi diklat dan logistik* , capaian kinerja kegiatannya dengan kualifikasi baik atau tercapai 96,52 %.
4. Dalam pencapaian Indikator 4 yaitu *Peningkatan penanganan tematik kawasan rawan bencana* , capaian kinerja kegiatannya dengan kualifikasi amat baik atau tercapai 122,95 %.
5. Dalam pencapaian Indikator 5 yaitu *Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana* , capaian kinerja kegiatannya dengan kualifikasi amat baik atau tercapai 103,31 %.
6. Dalam pencapaian Indikator 6 yaitu *Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana* , capaian kinerja kegiatannya dengan kualifikasi baik atau tercapai 98,57 %.
7. Dalam pencapaian Indikator 7 yaitu *Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana*, capaian kinerja kegiatannya dengan kualifikasi amat baik atau tercapai 103,09 %.

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 atau (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 42).
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018

1.2. Gambaran Pemerintah Kabupaten Boyolali

1.2.1. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali disebutkan bahwa kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali berada di bawah Pemerintah Kabupaten Boyolali dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.

1.2.2. Gambaran Umum

a. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi:

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai **tugas pokok** melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali **mempunyai fungsi:**

- a. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. koordinator pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. koordinator monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan penanggulangan bencana;
- i. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- j. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Boyolali dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, disebutkan bahwa kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali berada di bawah Pemerintah Kabupaten Boyolali dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, yang terdiri dari:

- a. Unsur Pengarah
- b. Kepala
- c. Kepala Pelaksana
- d. Sekretariat terdiri dari:
 - 1). Subbag. Subag. Umum dan Kepegawaian
 - 2). Subbag. Subag. Keuangan
 - 3). Subbag. Subag. Perencanaan dan Pelaporan
- e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - 1). Seksi. Pencegahan
 - 2). Seksi. Kesiapsiagaan
- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - 1). Seksi. Penangana Kedaruratan
 - 2). Seksi. Sarana, Prasarana dan Logistik
- g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 - 1). Seksi. Rehabilitasi
 - 2). Seksi. Rekonstruksi

Adapun bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana **Gambar. 1**

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBD

c. **Sumber Daya** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali

1). **Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 21 orang PNS dan 27 Non PNS yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Pria	16 orang
2	Wanita	5 orang
	Jumlah	21 orang

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan Jabatan/Eselon, pangkat / golongan, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Kepala Pelaksana / Sekretariat/ Bidang/ Seksi/Subbag	Eselon					Jml
		IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	
1.	Kepala Pelaksana	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	1	-	-	1
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	-	1	-	-	1
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	1	-	-	1
6.	Subag. Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	1
7.	Subag. Keuangan	-	-	-	1	-	1
8.	Subag. Perencanaan dan Pelaporan	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi. Pencegahan	-	-	-	1	-	1
10.	Seksi. Kesiapsiagaan	-	-	-	1	-	1
11.	Seksi. Penanganan Kedaruratan	-	-	-	1	-	1
12.	Seksi. Sarana, Prasarana dan Logistik	-	-	-	1	-	1
13.	Seksi. Rehabilitasi	-	-	-	1	-	1
14.	Seksi. Rekonstruksi	-	-	-	1	-	1
JUMLAH		1	-	5	8	-	14

Tabel : 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina /IV c	1	
2	Pembina /IV b	-	
3	Pembina /IV a	7	
4	Penata / III d	5	
5	Penata / III c	1	
6	Penata Muda Tk.I / III b	2	
7	Penata Muda / III a	2	
8	Pengatur Tk.I / II d	-	
9	Pengatur / II c	2	
10	Pengatur / II b	-	
11	Pengatur Muda, II a	1	
12	Juru	-	
Jumlah		21	

Tabel : 4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S-2)	5	
2.	Sarjana (S-1)	11	
3.	Diploma (D-3)	1	
4.	Sekolah Menengah Atas (SLTA)	3	
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	
6.	Sekolah Dasar (SD)	-	
J U M L A H		21	

Tabel : 5

Komposisi Non PNS

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	26	Tenaga THL
2.	Perempuan	1	
J U M L A H		27	

2). Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang/mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali dikelompokkan dalam sarana prasarana Umum dan khusus dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Sarana dan Prasarana Umum

No	Uraian Sarpras		Jumlah	Satuan	KET
01	Gedung dan Bangunan				
	1	Gedung Kantor	1	unit	
	2	Gedung Pusdalops	1	Unit	
02	Alat Transportasi				
	1	Kendaraan dinas roda 4	2	unit	
		Kendaraan dinas roda 2	7	unit	
03	Alat studio dan komunikasi		9	unit	
04	Alat – alat Kantor Kantor		16	Unit	
05	Mebelair		99	Unit	
06	Peralatan Rumah Tangga		50	unit	

Tabel 7.
Sarana dan Prasarana Khusus

KODE	Jenis Peralatan		Jumlah	Satuan	Ket / Asal
01	Alat Transportasi				
	1	Mobil Tangki Air	1	unit	BPBD Prov
		Mobil Water Treatment	1	unit	
		Mobil Truk Evakuasi	1	unit	
		Mobil Rescue	3	unit	1 pinjam BPBD Jateng
		Motor Trail	4	unit	
02	Alat Komunikasi dan Informasi				
		HT	7	unit	
		RIG	1	unit	
		SSB/RPP	1	unit	
03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi				
	4	Mesin Perahu 25 PK	1	unit	
	5	Peralatan Selam	1	unit	
	6	Chain Saw	4	unit	
	7	Mesin Pompa Air	3	unit	
	8	Slang hisap spiral 3	1	unit	
	9	Selang buang 3	1	unit	
	10	Sarangan slang hisap (Filter pompa air)	1	unit	
	11	Face Maker	3	unit	
	12	Helm Penyelamat XTZ	3	unit	
	13	Sepatu Bood	24	unit	
	14	Pemancar Canon	3	unit	
	15	Nozie Brip Yone Variable	3	unit	
	16	Kunci Hidran Baja	2	unit	

KODE	Jenis Peralatan		Jumlah	Satuan	Ket / Asal
04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
	1	WTP 250 lt	1	unit	
	2	Tenda Posko	1	unit	
	3	Tenda Keluarga	14	unit	
	4	Tandu Lipat	8	unit	
	5	Velbed	35	unit	
	6	Tandon Air	7	unit	
	7	Tenda Dapur Umum	1	unit	
	8	Tenda Pengungsi	3	unit	
	9	Tenda Gulung	55	unit	
	10	Tenda Individu	2	unit	
	11	WTP Portable Mini 25 L	2	unit	
06	Alat Penerangan dan Kelistrikan				
		Senter	10	unit	
		Solar Sel Generator	5	unit	
		Lampu Senter HID	1	unit	
		Solar Handle lamp	12	unit	
		Genset 5 KVA	2	unit	
		Genset 650 watt	1	unit	
		kabel	4	roll	
		Senter kepala	10		
07	Alat Pergudangan				
	1	Gerobag Sorong	4	unit	
	2	Sabit besar	10	unit	
	3	Sabit kecil	10	unit	
	4	Gergaji Tangan	5	unit	
	5	Kapak	2	unit	
	6	Skop Tangan	5	unit	
	7	Skop Pendel	4	unit	
	8	Cangkul	10	unit	
	9	linggis	5	unit	
	10	tali	1	roll	
	11	Helm proyek		Unit	
08	Alat Lainnya				
	1	Pompa air	3	unit	
	2	Karung Plastik	4586	unit	
	3	Dirgen 20 L	25	unit	
09	Pusdalop				
		Sarana Pusdalop	1	Set	
10	Peralatan TRC				
	1	USB	5	Buah	BNPB
	2	Kompas	5	Buah	BNPB
	3	Korek Gas Bara	5	Buah	BNPB
	4	Kacamata UV Protection	5	Buah	BNPB
	5	Lampu Senter	5	Buah	BNPB
	6	Pisau Lipat Multi Tools	5	Buah	BNPB
	7	Topi Lapangan	5	Buah	BNPB
	8	Helm Keselamatan	5	Buah	BNPB
	9	Rompi	5	Buah	BNPB
	10	Jaket	5	Buah	BNPB
	11	Tas Ransel Punggung	5	Buah	BNPB
	12	Sarung Tangan	5	Buah	BNPB

KODE	Jenis Peralatan		Jumlah	Satuan	Ket / Asal
	13	Sepatu Lapangan (Safety Shoes)	5	Buah	BNPB
	14	Sepatu Banjir (Bood)	5	Buah	BNPB
	15	Masker Karbon	5	Buah	BNPB
	16	Rompi Pelampung	5	Buah	BNPB
	17	Jas Hujan	5	Buah	BNPB
	18	Matras Alas Tidur	5	Buah	BNPB
	19	Kantong Tidur	5	Buah	BNPB
	20	Kaos	5	Buah	BNPB
	21	Laptop/Netbook	1	Unit	BNPB
	22	Printer Portable	1	Unit	BNPB
	23	Hanrdisk External Portable	1	Unit	BNPB
	24	Kamera Digital	1	Unit	BNPB
	25	Handycam	1	Unit	BNPB
	26	Telepon Satelit	1	Unit	BNPB
	27	GPS	1	Unit	BNPB
	28	HT	1	Unit	BNPB
	29	Desktop PC	1	Unit	BNPB
	30	Printer/Fax/Scanner/Copy	1	Unit	BNPB
	31	Radio Komonikasi All Band	1	Unit	BNPB
	32	Modem Internet Internal	1	Unit	BNPB
	33	Proyektor	1	Unit	BNPB
	34	UPS	1	Unit	BNPB

1.2.3. Aspek strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

- a. Aspek-aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Daerah Kabupaten 2018 sebagai berikut :

1). Aspek Kelembagaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai fungsi sebagaimana telah diuraikan di atas, Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali selalu memperhatikan isu-isu strategis diperoleh dengan mengakomodasi isu pelayanan organisasi (BPBD), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program Renstra BPBD Kabupaten

Boyolali Tahun 2016-2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD adalah :

Menyelaraskan, menjabarkan, dan mengembangkan peraturan /SOP penanggulangan bencana yang memadahi, serta meningkatkan koordinasi antara BPBD dengan OPD / organisasi kebencanaan di Kabupaten Boyolali.,

2). Aspek SDM/ sarana Prasarana

Sesuai tugas dan fungsi BPBD sebagai pengoordinasian penyelenggaraan urusan Kebencanaan , dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 21 orang PNS dan 27 Non PNS (TRC dan Pengemudi)maka ketercukupan dari aspek kuantitas dan kualitas sangat diperlukan, sehingga dari segi jumlah dan kompetensi pegawai yang memahami permasalahan kebijakan dan administrasi penyelenggaraan urusan kebencanaan serta pentingnya Sarpras dalam Penanggulangan Bencana maka berusaha meningkatkan SDM dan sarpras dalam Penanggulangan Bencana.

3). Anggaran

Anggaran dalam Penanggulangan Bencana sangat penting dalam pelaksanaan Pra Bencana , Saat tanggap darurat, dan Pasca Bencana.

b. Permasalahan :

Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara umum permasalahan pembangunan daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 yaitu;

1. Belum optimalnya implementasi standar pelayanan;
2. Belum optimalnya harmonisasi dan implementasi regulasi;
3. Belum optimalnya Rasio kecukupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan;
4. Belum optimalnya tingkat kemandirian keuangan daerah;
5. Belum optimalnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran;
6. Belum optimalnya kemampuan Perangkat Daerah dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat;

7. Belum optimalnya implementasi dokumen kajian untuk kebijakan teknis;
8. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip.

Permasalahan tersebut di atas dapat diuraikan sbb:

- 1). Kelembagaan Penanggulangan Bencana
 - a). Koordinasi penanggulangan bencana belum berlangsung secara optimal. Antara BPBD dengan OPD / organisasi kebencanaan di Kabupaten Boyolali.,
 - b). *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam penanggulangan bencana belum semua disusun dan disosialisasikan. Banyaknya pihak yang peduli dan terlibat dalam penanggulangan bencana belum tertata dan mempunyai struktur komando yang jelas
 - c). Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang.
- 2). Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
 - a). Kurangnya tenaga teknik dan administrasi penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar kompetensi penanggulangan bencana;
 - b). Keberadaan sarana dan prasarana pendukung operasional penanggulangan bencana belum sepenuhnya ideal untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan cakupan dan tingkat ancamana bencana;
 - c). Belum adanya gedung penyimpanan logistik di BPBD .
 - d). Logistik dan material kebencanaan belum tersedia secara ideal sesuai dengan tingkat bahaya dan kerentanan masyarakat.
- 3). Anggaran

Anggaran penanggulangan bencana masih minim dan belum menjadi prioritas yang penting dalam perencanaan pembangunan. Faktor minimnya anggaran di BPBD menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak menjadi isu penting dalam pembangunan. Paradigma *relief/responsive* saat tanggap darurat masih lebih dominan dibandingkan dengan paradigma pengurangan risiko bencana yang mendasarkan pengelolaan program dan kegiatan pada saat tidak terjadi bencana, sehingga dukungan/alokasi dana masih relative minim dan cenderung menyediakan dana sebagai dana bantuan saat tanggap darurat.

1.3. Sistematika Penyajian LKjIP

HALAMN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan LkjiP

1.2. Gambaran Umum

1.2.1. Organisasi Perangkat Daerah

1.2.2. Gambaran Umum

1.2.3. Aspek strategis dan Permasalahan utama

1.3. Sistematika Penyusunan LkjiP

BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB. III. AKUNTANSI KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Keuangan

BAB. IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

4.2. Saran dan Tindak Lanjut

DAFTAR LAMPIRAN

A. Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021

B. Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018

C. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik

Rencana stratejik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretegik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Boyolali serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi.

Visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dikarenakan program/kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada dokumen renstra yang lama dan pada saat penyusunan perjanjian kinerja perubahan tahun 2016 renstra setda tahun 2016-2021 baru proses penyusunan.

2.1.1. Visi

Visi Perangkat Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Perangkat Daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Perangkat Daerah baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali adalah :

Mengacu visi Bupati Boyolali Periode 2016-2021 adalah Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Sejahtera

Makna pernyataan visi RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 dijabarkan berikut ini guna membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan

perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

2.1.2. Misi

Penjabaran misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Boyolali, meneruskan semangat Pro Investasi
2. Misi 2 : Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan

3. Misi 3 : Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera

4. Misi 4 : Boyolali, sehat, produktif, berdaya saing
5. Misi 5 : Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional
6. Misi 6 : Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan
7. Misi 7 : Boyolali, lebih maju dan berteknologi

Untuk mencapai visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali yaitu sesuai Misi ketiga “ **Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera** “ ditetapkan sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD yaitu **Terwujudnya Masyarakat yang tertib, aman , dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial.**

Adapun untuk mendukung tercapinya sasaran tersebut di atas, didukung tujuh indikator / sasaran BPBD sbb:

- Indikator 1 : *Peningkatan kebijakan dan kelembagaan*
- Indikator 2 : *Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu*
- Indikator 3 : *Peningkatan sistem informasi diklat dan logistik*
- Indikator 4 : *Peningkatan penanganan tematik kawasan rawan bencana*
- Indikator 5 : *Efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana*
- Indikator 6 : Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
- Indikator 7 : Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2018 telah menetapkan 3 program dan 42 kegiatan.

Sasaran strategis tersebut memiliki beberapa indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana tersebut dalam **Tabel 8**.

Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD yang digunakan sebagai acuan OPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021.

Tabel. 8
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
BPBD Kabupaten Boyolali

Halaman 17 s/g 22

Tabel. 8
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
BPBD Kabupaten Boyolali

Halaman 17 s/g 22

Tabel. 8
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
BPBD Kabupaten Boyolali

Halaman 17 s/g 22

Tabel. 8
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
BPBD Kabupaten Boyolali

Halaman 17 s/g 22

Tabel. 8
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
BPBD Kabupaten Boyolali

Halaman 17 s/g 22

Tabel. 8
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
BPBD Kabupaten Boyolali

Halaman 17 s/g 22

2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dalam rencana kinerja Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 9
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target score
1	Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	23,3
		Peningkatan kajian risiko dan perencanaan terpadu	10,3
		Peningkatan sistim informasi diklat dan logistik	33,6
		Peningkatan penanganan tematik kawasan rawan bencana	13
		Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	25,7
		Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	59,3
		Peningkatan sistim pemulihan bencana	10,3

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana Tabel. 10 disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018. berikut :

Tabel 10

Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Boyolali
Tahun 2018

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target scor
1	Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	23,3
		Peningkatan kajian risiko dan perencanaan terpadu	10,3
		Peningkatan sistim informasi diklat dan logistik	33,6
		Peningkatan penanganan tematik kawasan rawan bencana	13
		Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	25,7
		Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	59,3
		Peningkatan sistim pemulihan bencana	10,3

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan belanja langsung Rp. 3.674.999.000; yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 **(terlampir)**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2018 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Penilaian Kinerja
3. Realisasi Keuangan

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai **sebagai berikut :**

- **> 100 = Amat Baik**
- **76 - 100 = Baik**
- **56 - 75 = Cukup Baik**
- **< 55 = Cukup Baik**

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kegiatan dalam sasaran tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja OPD Tahun 2018 dengan realisasinya.

Score yang ditetapkan pada target dan realisasi, berdasarkan Interval dari score kecil sampai besar (Range) yaitu score 0 – 100, adapun capaiannya berupa prosentase. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Boyolali berdasarkan hasil **pengukuran kinerja sasaran** sebagaimana pada tabel di bawah:

Sasaran 1 : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 11.
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja	Satuan	Target RPJMD 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Koordinator
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1 Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	score	27,5	20,5	20,5	23,3	24	103	Amat Baik	Sekretaris dan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2 Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	score	21,1	9,1	10	10,3	11	107	Amat Baik	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3 Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	score	39,6	29,6	30,5	33,6	35	104	Amat Baik	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4 Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	score	15	11,4	12	13	15	115	Amat Baik	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	score	30,2	22,7	25	25,7	26	101	Amat Baik	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6 Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	score	70	52,3	55	59,3	56	94	Baik	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan dan Bidang Kedaruratan & Logistik
7 Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	score	12,1	9,1	10	10,3	11	107	Amat Baik	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Evaluasi per Indikator Kinerja :

1) Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan

Target score 23,3 dengan Realisasi Score = 24, capaian 103 % Tingkat keberhasilan adalah Sangat Baik

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena didukung dengan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana dan Pembuatan Perda Penyandang Disabilitas hubungannya dengan Bencana
Yang terdiri dari 9 sub sektor dan 36 pertanyaan kunci .

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah tidak semua masyarakat yang terlibat dalam pemenuhan pembentukan Desa tangguh bencana bisa berpartisipasi aktif .

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Jemput bola mendatangi tempat tinggal masyarakat terlibat.

- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagian indikator telah terpenuhi oleh masyarakat ybs. dengan penyerapan anggaran untuk:

- *. Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana target anggaran Rp. 97.948.000,; Realisasi Rp.95.498.500, sehingga ada penghematan 3 %;
- *. Kegiatan Pembuatan Perda Penyandang Disabilitas hubungannya dengan Bencana target anggaran Rp. 45.000.000, Realisasi Rp.43.657.500, sehingga ada penghematan 3 %;

- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan **program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.**

Dan 1 kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Jemowo Kecamatan Musuk dan Desa Klakah Kwecamatan Selo dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pemenuhan 20 (dua puluh) indikator yang diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi DESTANA (*sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan tangguh Bencana*) yaitu :

1. Kebijakan/peraturan di desa/kelurahan tentang penanggulangan bencana/Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
2. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), rencana aksi komunitas, dan rencana kontijensi;
3. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB);
4. Relawan penanggulangan bencana;
5. Kerjasama antar pelaku dan wilayah;
6. Dana tanggap darurat;
7. Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
8. Pelatihan untuk pemerintah desa;
9. Pelatihan untuk tim relawan;
10. Pelatihan untuk warga desa;
11. Pelibatan/partisipasi warga desa;
12. Pelibatan perempuan dalam tim relawan;
13. Peta dan analisa risiko;
14. Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian;
15. Sistem peringatan dini;
16. Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik);
17. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat;
18. Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan;
19. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
20. Perlindungan aset produktif utama masyarakat.

2) *Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu*

Target score 10,3 dengan Capaian Score = 11 capaian 107% Tingkat keberhasilan adalah sangat Baik

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena partisipasi aktif dari partisipan kebencanaan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai --

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah --

- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan penyerapan anggaran untuk Kegiatan :

*. Kegiatan pembuatan Peta Rawan Bencana target anggaran Rp.29.184.750, Realisasi Rp. 28.068.250, sehingga ada penghematan 9 %.

- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan **program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana** dengan kegiatan :

- Kegiatan Pembuatan Peta Rawan bencana dalam bentuk pembuatan dokumen peta rawan bencana di kecamatan Simo dan Wonosegoro.

3) *Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik*

Target score 33,6 dengan Realisasi Score = 35, capaian 104% Tingkat keberhasilan adalah sangat Baik

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan salahsatunya karena inovasi baru Sikabi di BPBD sehingga dapat mendukung peningkatan sistim informasi Kebencanaan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena keterbatasan dana maka baru sebagian masyarakat dapat mengikuti sosialisasi dan baru sebagian pemilik HP Android yang terdaftar pada Sikabi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melaksanakan sosialisasi berkelanjutan

- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber, dengan penyerapan anggaran untuk:

*. *Kegiatan* BinteK Pengembangan Sistim Informasi Bencana Boyolali (Sikabi) target anggaran Rp. 23.889.250 Realisasi Rp. 19.863.500 ,sehingga ada penghematan 17 %;

*. Kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarpras Kebencanaan target anggaran Rp. 321.148.000, Realisasi Rp.314.671.000; sehingga ada penghematan 2 %.

*. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana target anggaran Rp. 36.378.000 Realisasi Rp. 33.978.000 ,sehingga ada penghematan 7 %;

*. Kegiatan Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan target anggaran Rp. 340.000.000 Realisasi Rp. 74.366.300, sehingga ada penghematan 79 %.

- *. Kegiatan Pemasangan rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana target anggaran Rp.18.366.000, Realisasi Rp.18.108.000, sehingga ada penghematan 2 %.
 - *. Pengadaan panflet , boklet / kalender dll target anggaran Rp.5.000.000, Realisasi Rp. 5.000.000, sehingga tidak ada penghematan.
- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan **program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**. Dengan kegiatan:

- Kegiatan Bintel Pengembangan Sistim Informasi Bencana Boyolali (Sikabi) dilaksanakan dengan pengenalan sistim kebencanaan yang terintegrasi, sbg alat memantau kebencanaan di Kabupaten Boyolali melalui HP yang terdaftar di Sikabi.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana kegiatan ini dilaksanakan dengan pengenalan sarpras kebencanaan kepada peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari Peg. BPBD, TRC, dan masyarakat, Anak Sekolah pondok pesantren, Disabilitas, organisasi hubungannya dengan bencana.
- Kegiatan Pengadaan Sarpras Kebencanaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pengadaan 5 unit Meteran lapangan, 6 unit pakaian lapangan , 1 unit perahu karet, 1 unit mesin E40J, 2 Unit Regulator selam, 3 unit GPS, 1 unit Sony handycam, 2 unit Chainsaw,
- Kegiatan Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan di lapangan paras dengan apel siaga, simulasi, dan pembentukan klaster bencana.
- Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pengadaan kebutuhan Dasar berupa bahan pokok yang disalurkan kepada korban bencana, hanya dibelanjakan 25 % karena yang 75% bisa dibelanjakan apabila terjadi erupsi Merapi..
- Pemasangan rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pemmembuat dan pemasangan rambu jalur evakuasi di daerah rawan bencana yaitu kecamatan karanggede, di kecamatan cepogo, dan di kecamatan Wonosegoro
- Pengadaan panflet , boklet / kalender dll dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho di titik rawan bencana dan jalur masuk daerah rawan bencana

4). Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Target score 13 dengan Realisasi Score = 15, capaian 115 % Tingkat keberhasilan adalah Amat Baik

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan salah satunya karena FPRB telah dibentuk dengan didukung terbentuknya komunitas-komunitas sungai di beberapa Desa/Kecamatan, Kesadaran masyarakat akan perlunya tempat evakuasi apabila ada bencana, masyarakat menyadari pentingnya papan penunjuk arah dan peringatan bahaya apabila terjadi bencana.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurang jelasnya Regulasi

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan komunikasi secara intens dengan pihak yang bersangkutan dalam pembuatan regulasi.

- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber, dengan penyerapan anggaran untuk:

- *. Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan target anggaran Rp. 24.000.000, Realisasi Rp.22.139.500, sehingga ada penghematan 7,75%;
- *. Kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana target anggaran Rp.35.280.500, Realisasi Rp.32.257.221, sehingga ada penghematan 9 %;
- *. Kegiatan Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana target anggaran Rp.73.514.000 Realisasi Rp.70.551.100, sehingga ada penghematan 4%;

- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan **program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**. Dengan kegiatan:

- Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Penyuluhan dan sosialisasi kebencanaan terhadap Disabilitas, anak Sekolah, dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Selo.
- Kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Konggres FPRB di pendopo Alit Kabupaten Boyolali di dalamnya pembentukan kepengurusan baru masa bakti Th 2018 s.d 2021 dan pelantikan ULD (Unit Layanan Disabilitas) Kabupaten Boyolali

5). **Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana**

Target score 25,7 dengan Realisasi Score = 26, capaian 101 % Tingkat keberhasilan adalah Amat Baik

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan kerjasama yang baik antar Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya masyarakat / relawan telah membuat komunitas sungai sendiri-sendiri, dengan penyerapan anggaran untuk:

*. Rakor Kebencanaan target anggaran Rp. 95.057.250, Realisasi Rp.87.413.300 , sehingga ada penghematan 8,14%;

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan **program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**, dengan 4 kegiatan yaitu:

- Rakor Kebencanaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dilaksanakan rakor Workshop FPRB dan rakor menghadapi bencana kekeringan, longsor, dan banjir.

6). ***Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana***

Target score 59,3 dengan Realisasi Score = 56, capaian 94% tingkat keberhasilan adalah:

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena peserta FGD rencana kontigensi bencana tanah longsor peta risiko bencana telah membawa siap dengan data yang dibutuhkan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah rencana kontigensi bencana tanah longsor belum dilakukan Gladi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah kedepannya melaksanakan gladi rencana kontigensi bencana tanah longsor

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yaitu memperdayakan FPRB dengan penyerapan anggaran untuk:

*. Kegiatan Penyusunan rencana kontigensi target anggaran Rp. 48.216.000, Realisasi Rp.45.536.000, sehingga ada penghematan 6%;

*. Kegiatan Peningkatan Kapasitas TRC dan Gabungan Penyelamatan target anggaran Rp. 37.400.000 Realisasi Rp. 32.341.500 ,sehingga ada penghematan 14%;

*. Kegiatan Glady Penanggulangan Bencana target anggaran Rp.119.655.000, Realisasi Rp.115.479.000,sehingga ada penghematan 4%;

*. Kegiatan Jambore Penanggulangan Bencana target anggaran Rp. 97.200.000 Realisasi Rp. 91.692.000 ,sehingga ada penghematan 6 %;

*. Kegiatan Pelatihan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) target anggaran Rp. 35.266.500; Realisasi Rp. 26.786.500 ,sehingga ada penghematan 25 %;

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan **program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana** dengan 4 kegiatan:

- Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi membuat dokumen perencanaan skenario bila terjadi banjir di wilayah kabupaten Boyolali
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas TRC dan Gabungan Penyelamatan dilaksanakan selama 2 hari, satu hari untuk teori dan 1 hari praktek lapangan di waduk kabupaten Sukoharjo

- Kegiatan Glady Penanggulangan Bencana dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan simulasi penanggulangan bencana di lapangan Sruni kecamatan Musuk yang di ikuti oleh OPD terkait kebencanaan, FPRB, Relawan, TNI/Polri, Tokoh Agama/Masyarakat, Organisasi kebencanaan, dan masyarakat rawan bencana, Penyandang Disabilitas yang jumlahnya kurang lebih 1000 orang
- Kegiatan Jambore Penanggulangan Bencana dilaksanakan di Desa Telogolele selama 2 hari diikuti oleh TNI, Polri, OPD , Relawan ,PMI, Anak Sekolah, Disabilitas, dan Organisasi hubungannya dengan bencana
- Kegiatan Peklatihan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dilaksanakan Selama dua hari satu hari teori di aula BP3D dan satu hari praktek lapangan di Desa Bandung Kecamatan Wonosegoro

7. Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana

Target score 10,3 dengan Realisasi Score = 11, capaian 107 % Tingkat keberhasilan adalah sangat baik

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena didukung oleh kerjasama yang baik antar Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta adanya inisiatif untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah --

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah --

- b. *. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan memberdayakan Forum Pengurangan Risiko Bencana dan TRC dalam Penanggulangan Bencana, dengan penyerapan anggaran untuk:
 - *. Kegiatan Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca target anggaran Rp. 17.000.000 Realisasi Rp. 12.818.500 ,sehingga ada penghematan 6 %
 - *. Kegiatan Perhitungan Kerusakan dan kerusakan (DALA) target anggaran Rp. 17.193.000 Realisasi Rp. 14.618.500 ,sehingga ada penghematan 15 %
 - *. Kegiatan Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing) target anggaran Rp. 13.710.000 Realisasi Rp. 13.326.500 ,sehingga ada penghematan 13 %
 - *. Kegiatan Pengembangan cooperate Sicial responcibility (perusahaan kepedulian social) pasca bencana target anggaran Rp.16.387.500 , Realisasi Rp.13.000.000 ,sehingga ada penghematan 21 %

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang Keberhasilan:

- Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan **program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**
- Kegiatan Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penyusunan laporan usulan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB
- Kegiatan Perhitungan Kerusakan dan kerusakan (DALA) dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana
- Kegiatan Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing) dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan peningkatan kemampuan pendampingan dalam apabila terjadi bencana
- Kegiatan Pengembangan cooperate Social responcibility (perusahaan kepedulian social) pasca bencana dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan workshop.

3.2 Realisasi Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada tahun anggaran 2018, yaitu :

3.2.1. Target Pendapatan

Pada tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak mentargetkan untuk menghasilkan pendapatan.

3.2.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2018

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 5.725.158.000-. Dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 5.348.462.382,- atau (93,42%), sehingga terdapat efisiensi sebanyak 6,58 %.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka belanja tidak langsung anggran yang tersedia sebanyak Rp. 2.050.159.000,- realisasi Rp. 2.042.508.056; (99,62%) sedangkan belanja langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 3.674.999.000,- direalisasikan sebesar Rp. 3.307.954.326,- (90,01%)

Berdasarkan realisasi keuangan masing-masing kegiatan pada belanja langsung, maka dapat diketahui bahwa dari 41 kegiatan diperoleh nilai/persentase sebesar 80,68 %. Adapun rincian realisasi masing-masing kegiatan dapat dilihat pada daftar di bawah ini:

Tabel. 12
Realisasi Anggaran

PROGRAM /KEGIATAN		TARGET Rp.	REALISASI Rp.	Capaian Keuangan (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.200.000	2.199.000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	86.000.000	74.428.112	86,54
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	163.630.000	154.592.755	94,48
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	200.000	125.000	62,50
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000	11.998.000	99,98
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.950.000	99,50
7	Penyediaan alat tulis kantor	42.976.250	42.975.750	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	21.969.500	99,86

PROGRAM /KEGIATAN		TARGET Rp.	REALISASI Rp.	Capaian Keuangan (%)
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.199.000	5.198.850	100,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	8.470.000	84,70
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.502.000	83,40
12	Penyediaan bahan logistik kantor	140.000.000	139.590.963	99,71
13	Penyediaan makanan dan minuman	39.000.000	38.643.000	99,08
14	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	278.000.000	277.814.015	99,93
15	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran	515.000.000	514.896.410	99,98
16	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000	14.983.000	99,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pembangunan Gedung Kantor	750.000.000	743.194.000	99,9
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16.000.000	15.436.300	96,48
3	Pengadan Mebeler	0	0	0
4	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	18.000.000	17.817.000	98,98
ProgramPeningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana				
1	Pengadaan sarana Kebencanaan	321.148.000	314.671.000	97,98
2	Pengadaan logistik Kebencanaan	340.000.000	74.366.300	21,87
3	Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	17.000.000	12.818.500	75,40
4	Sosialisasi kebencanaan	24.000.000	22.139.500	92,25
5	Rakor Penanganan Bencana	95.057.250	87.413.300	91,96
6	forum pengurangan risiko bancana (FPRB)	35.280.500	32.257.221	91,43
7	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	97.948.000	95.498.500	97,50
8	Penyusunan Rencana Kontijensi	48.216.000	45.536.000	94,44
9	Pembuatan Perda Penyandang Disabilitas hubungannya dengan Bencana	45.000.000	43.657.500	97,02
10	Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi dan papan pengumuman desa/daerah rawan bencana	18.366.000	18.108.000	98,60

PROGRAM /KEGIATAN		TARGET Rp.	REALISASI Rp.	Capaian Keuangan (%)
11	Pengadaan Panflet /booket /spanduk/kalender kebencanaan	5.000.000	5.000.000	100,00
12	Pembuatan Peta Rawan Bencana	29.184.750	28.068.250	96,17
13	Kegiatan Perhitungan Kerusakan dan kerusakan (DALA)	17.193.000	14.618.500	85,03
14	Pendampingan bagi korban bencana	13.710.000	13.326.500	97,20
15	Pengembangan cooperate Sicial responcibility (perusahaan kepedulian social pasca bencana)	16.387.500	13.000.000	79,33
16	Glady Penanggulangan Bencana	119.655.000	115.479.000	96,51
17	Bintek Pengembangan Sistim Informasi Bencana Boyolali (Sikabi)	23.889.250	19.863.500	83,15
18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana	36.378.000	33.978.000	93,40
19	Peningkatan Kapasitas TRC dan Gabungan Penyelamatan	37.400.000	32.341.500	86,47
20	Pelatihan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	35.266.500	26.786.500	75,95
21	Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana	73.514.000	70.551.100	95,97
22	Jambore Penanggulangan Bencana	97.200.000	91.692.000	94,33
41				
	JUMLAH	3.674.999.000	3.307.954.326	90,01

NB: Pengadaan logistik hanya dibelanjakan 25 % dari target, sebab yang 75% hanya bisa diambil/dibelanjakan kalau ada Merapi terjadi erupsi.

BAB. IV

P E N U T U P

4.1. Simpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Dengan memperhatikan uraian data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena :

- *. Semua target kegiatan yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Amat Baik dan Baik ;
- *. Semua target indikator Kinerja Utama / sasaran yang ditetapkan juga bisa tercapai dengan baik , dengan menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan yaitu 90,01 %. Hal ini berarti terjadi efisiensi 9,09 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana :
 - a. Masih adanya kendala dan permasalahan sehubungan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dan otonomi daerah.
 - b. Pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana relatif masih minim.
 - c. Paradigma *relief/responsive* saat tanggap darurat masih lebih dominan dibandingkan dengan paradigma pengurangan risiko bencana yang mendasarkan pengelolaan program dan kegiatan pada saat tidak terjadi bencana
2. Regulasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - a. Penerapan regulasi utamanya terhadap Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 21, 22, dan 23 tahun 2009 dalam pelaksanaannya masih belum optimal sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat yang terkena bencana belum optimal.
 - b. Penyusunan perencanaan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum berjalan secara optimal, , perencanaan tersebut meliputi:
 - 1) Pada Tahap Pencegahan dan Mitigasi, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*)

atau sering disebut juga Rencana Kesiapan (*Disaster Preparedness Plan*).

- 2) Pada Tahap Kesiapsiagaan, dilakukan Penyusunan Rencana Kedaruratan (*Emergency Response Plan*) atau lebih spesifik jika untuk menghadapi suatu ancaman adalah Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*).
 - 3) Pada Tahap Tanggap Darurat dilakukan pengaktifan Rencana Operasi (*Operation Plan*) yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi.
 - 4) Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana.
3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- a. Koordinasi penanggulangan bencana antar Pemangku Kepentingan belum berlangsung secara optimal.
 - b. *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam penanggulangan bencana belum disosialisasikan. Banyaknya pihak yang peduli dan terlibat dalam penanggulangan bencana belum tertata dan mempunyai struktur komando yang jelas
 - c. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang.
4. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
- a. Kurangnya tenaga teknik dan administrasi penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar kompetensi penanggulangan bencana;
 - b. Keberadaan sarana dan prasarana pendukung operasional penanggulangan bencana belum sepenuhnya ideal untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan cakupan dan tingkat ancaman bencana;
 - c. Logistik dan material kebencanaan belum tersedia secara ideal sesuai dengan tingkat bahaya dan kerentanan masyarakat.
5. Anggaran
- Anggaran penanggulangan bencana masih minim dan belum menjadi prioritas yang penting dalam perencanaan pembangunan. Faktor minimnya anggaran di Kabupaten Boyolali menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak menjadi isu penting dalam pembangunan. Paradigma *relief/responsive* saat tanggap darurat masih lebih dominan dibandingkan dengan paradigma pengurangan risiko bencana yang mendasarkan pengelolaan program dan kegiatan pada saat tidak terjadi bencana.

4.2. Saran dan tindak lanjut

4.2.1. Saran.:

Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Tindaklanjut yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali adalah :

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a). Menyelenggarakan sosialisasi penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangnya secara kontinue kepada aparatur pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada dunia usaha.
 - b). Memberikan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat, Penyandang disabilitas, dan dunia usaha terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, mulai saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana.
2. Regulasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - a. Melakukan akselerasi dan advokasi penerapan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 21, 22, dan 23 tahun 2009.
 - b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi:
 - *. Pada Tahap Pencegahan dan Mitigasi, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*) atau sering disebut juga Rencana Kesiapan (*Disaster Preparedness Plan*).
 - *. Pada Tahap Kesiapsiagaan, dilakukan Penyusunan Rencana Kedaruratan (*Emergency Response Plan*) atau lebih spesifik jika untuk menghadapi suatu ancaman adalah Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*).
 - *. Pada Tahap Tanggap Darurat dilakukan pengaktifan Rencana Operasi (*Operation Plan*) yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi.
 - *. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana.

3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana

- a. Mendorong Desa/Kelurahan untuk membentuk Desa Tangguh Bencana.
- b. Perlu segera disusun dan ditetapkan *Standard Operational Procedure (SOP)* penanggulangan bencana per jenis bencana oleh seluruh pemangku kepentingan.
- c. Pelatihan *Standard System Manajemen Keadaan Darurat* dapat dijadikan rujukan dan pedoman bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kedaruratan

4. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

- a. Menggalakkan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Boyolali yang telah dibentuk sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana
- b. Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan darurat bagi relawan, pelajar maupun masyarakat umum, Penyandang Disabilitas, perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara periodik untuk masing-masing jenis bencana
- c. Rotasi jabatan dan staf dapat dilakukan jika sumberdaya yang terlatih diganti dengan sumberdaya yang terlatih dan mempunyai kompetensi yang sama. Kebijakan rotasi/pemindahan pegawai perlu memperhatikan kompetensi dan kebutuhan lembaga. Kapasitas dan kapabilitas SDM dimasing-masing lembaga harus lebih dari satu orang/mempunyai nback-up sehingga sewaktu-waktu terjadi rotasi, kapasitas SDM dalam melanjutkan tugas pokok dan fungsi dapat lancar dan tidak menemui permasalahan
- d. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya kebencanaan wajib dilakukan setiap periode untuk refreshing dan update pengetahuan sekaligus untuk menambah jumlah kapasitas Sumber daya manusia yang kompeten Bagi pengembangan sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Boyolali.
- e. Meningkatkan peran BPBD Kabupaten Boyolali terus melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jateng dan BNPB selaku instansi pembina pusat untuk ikut membantu penguatan kelembagaan.

- f. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan pemerintah daerah.
- g. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan instansi terkait untuk memback-up persediaan logistik maupun perlengkapan kebencanaan yang lain.

5. Anggaran

- a. Memberikan masukan kepada BPBD Prov. Jateng dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dapat memberikan alokasi dana untuk pengurangan risiko bencana lebih besar dibandingkan operasional kegiatan penanggulangan yang lain. Di tingkat nasional. Anggaran Pengurangan Risiko Bencana masih dibahas agar bisa memenuhi standard internasional.
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Boyolali.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional perlu dibina dan digalakkan terutama untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2018 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Boyolali, Januari 2019



Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran pada **Tabel 11** tersebut di atas, ditunjang dengan 1 program Teknis yaitu Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana dan 16 kegiatan.

1. Indikator Kinerja Utama Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan dilaksanakan dengan Program Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan 1 kegiatan yaitu Pembentukan Desa Tangguh Bencana
2. Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu dilaksanakan dengan program peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan 1 kegiatan yaitu Rakor Kebencanaan dan kegiatan Rakor Penanganan Bencana
3. Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dilaksanakan dengan program peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan 1 kegiatan yaitu Sosialisasi Kebencanaan.
4. Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dilaksanakan dengan program peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan 1 kegiatan2 kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Kontijensi dan Pembuatan Peta Rawan bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan dengan program peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan dengan 4 kegiatan yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana, Pembentukan Sister Village, Pengadaan panflet , boklet / kalender dll, dan Pemasangan rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana.
6. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan dengan program peningkatan kapasitas penanggulangan

bencana, dan 3 kegiatan yaitu Glady Penanggulangan Bencana, Pengadaan Sarpras Kebencanaan dan Pengadaan Logistik Kebencanaan.

7. Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana dilaksanakan dengan program peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan 1 kegiatan⁴ kegiatan yaitu Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Kegiatan Perhitungan Kerusakan dan kerusakan (DALA), Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing), dan Pengembangan cooperate Social responcibility (perusahaan kepedulian social) pasca bencana

Berdasarkan hasil capaian kinerja dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama tersebut di atas, dapat diuraikan sbb:

1. *Peningkatan kebijakan dan kelembagaan*

Target score 21,9 dengan Capaian Score = 20,5, Tingkat keberhasilan adalah Amat Baik..

Target maupun realisasi di atas belum memenuhi kebutuhan untuk Indikator capaian Peningkatan kebijakan dan kelembagaan, sehingga ke depannya perlu dilakukan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

2. *Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu*

Target score 9,7 dengan Capaian Score = 10,4, ini dicapai. Target maupun realisasi di atas telah memenuhi kebutuhan untuk Indikator capaian Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu, Namun ke depannya perlu juga dilakukan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

3. *Peningkatan sistem informasi diklat dan logistik*

Target score 31,6 dengan Capaian Score = 30,5, ini dicapai dengan 1 kegiatan yaitu Sosialisasi Kebencanaan. Target maupun realisasi di atas belum memenuhi kebutuhan untuk Indikator capaian Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu , sehingga ke depannya perlu dilakukan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

4. *Peningkatan penanganan tematik kawasan rawan bencana*

Target score 12,2 dengan Capaian Score = 15, ini dicapai dengan. Target maupun realisasi di atas telah memenuhi kebutuhan untuk Indikator capaian Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu , namun ke depannya perlu juga dilakukan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

5. *Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana*

Target score 24,2 dengan Capaian Score = 24, ini dicapai Target maupun realisasi di atas belum memenuhi kebutuhan untuk Indikator capaian Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu , sehingga ke depannya perlu dilakukan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran

6. *Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana*

Target score 55,8 dengan Capaian Score = 55, ini dicapai dengan 3 kegiatan yaitu Glady Penanggulangan Bencana, Pengadaan Sarpras Kebencanaan dan Pengadaan Logistik Kebencanaan. Target maupun realisasi di atas belum memenuhi kebutuhan untuk Indikator capaian Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu , sehingga ke depannya perlu dilakukan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran

7. *Peningkatan sistim pemulihan bencana*

Target score 9,7 dengan Capaian Score = 10, ini dicapai dengan . Target maupun realisasi di atas telah memenuhi kebutuhan untuk Indikator capaian Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu , namun ke depannya perlu juga dilakukan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran

yaitu:

- a. Pengembangan desa tangguh bencana
- b. Glady penanggulangan bencana
- c. Sosialisasi kebencanaan
- d. forum pengurangan risiko bencana (FPRB)
- e. Pembentukan Sister Village
- f. Rakor Penanganan Bencana
- g. Penyusunan Rencana Kontijensi

- h. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi dan papan pengumuman desa/daerah rawan bencana
- y. Pengadaan Panflet /booket /spanduk/ kalender kebencanaan
- k. Pembuatan Peta Rawan Bencana
- l. Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- m. Kegiatan Perhitungan Kerusakan dan kerusakan (DALA)
- n. Pengadaan sarana Kebencanaan
- o. Pengadaan logistik Kebencanaan
- p. Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing)
- q. Pengembangan cooperate Sicial responcibility (perusahaan kepedulian social pasca bencana)
yaitu Pembentukan desa tangguh bencana.

Pencapaian sasaran strategis-1 pada Tahun 2018 di atas pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%.

Sasaran 2 : Peningkatan kajian resiko dan perencanaan terpadu

Tabel 12
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra	Target RPJMD 2017	Tahun 2016		Tahun 2017			Kategori	Koordinator
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1 Terlaksananya sinkronisasi penanganan bencana	keg	28	3	3	3	3	3	100	AB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-2, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan yaitu Rakor Penanganan Bencana

Pencapaian sasaran strategis-2 pada Tahun 2018 di atas pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%.

Sasaran 3 : Peningkatan sistem informasi diklat dan logistik

Tabel 13
Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra	Target RPJMD 2017	Tahun 2016		Tahun 2017			Kategori	Koordinator
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		

1	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	orang	1525	3	400	500	475	475	100	AB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
---	---	-------	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------------------------------------

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-3, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan yaitu Sosialisasi Kebencanaan.

Pencapaian sasaran strategis-3 pada Tahun 2018 di atas pada prinsipnya lebih rendah dengan pencapaian pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja th 2016 mencapai 125 % dan tahun 2018 mencapai 100%.

Sasaran 4 : Peningkatan penanganan tematik kawasan rawan bencana

Tabel 14
Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra	Target RPJMD 2017	Tahun 2016		Tahun 2017			Kategori	Koordinator
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah Dokumen Renkon	Dok	5	1	1	1	1	100		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Jumlah Peta Rawan Bencana	Dok	25	6	4	6	6	100	AB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-4, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, terdapat 1 buah program dan 2 buah kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Boyolali dan Pembuatan peta Rawan Bencana.

Pencapaian sasaran strategis-4 pada Tahun 2018 di atas pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%.

Sasaran 5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana

Tabel 15
Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra	Target RPJMD 2017	Tahun 2016		Tahun 2017			Kategori	Koordinator
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1 Terlaksananya Program Forum pengurangan Risiko Bencana	keg	14	3	2	2	3	3	100	AB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2 Jumlah dokumen MOU jumlah Desa sister Vilarge	MOU	44	6	8	8	6	6	100	AB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Desa	62	12	8	9	12	12	100	AB	
3 Tersedianya panflet , boklet / kalender dll	unit	115	15	0	0	15	15	100	AB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4 Terpasangnya rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana	unit	218	40	0	0	40	40	100	AB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-5, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, terdapat 1 buah program dan 4 buah kegiatan yaitu Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Pembentukan Sister Vilage (Desa Bersaudara), Pengadaan Pemflet/booklet/spanduk/kalender Kebencanaan, Pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi dan papan peringatan desa daerah rawan bencana.

Pencapaian sasaran strategis-5 pada Tahun 2018 di atas untuk 3 kegiatan sama dengan pencapaian pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%, namun ada satu kegiatan yang pada tahun 2018 tidak melaksanakan karena tidak menganggarkan yaitu kegiatan Pengadaan Pemflet/booklet/ spanduk/ kalender Kebencanaan.

Sasaran 6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

Tabel 16
Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra	Target RPJMD	Tahun 2016	Tahun 2017	Kategori	Koordinator
-------------------	--------	----------------	--------------	------------	------------	----------	-------------

			2017	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Terlaksananya Glady Penanggulangan Bencana	keg	5	1	0	1	1	100	AB	Bidang Kedaruratan dan Logistik
2	Bertambahnya sarpras kedaruratan	unit	346	54	10	54	54	100	AB	Bidang Kedaruratan dan Logistik
3	Tersalurnya logistik kpd korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	AB	Bidang Kedaruratan dan Logistik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-6, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018, terdapat 1 buah program dan 3 buah kegiatan yaitu Glady Penanggulangan Bencana, Pengadaan Sarana Kebencanaan, Pengadaan logistik kebencanaan.

Pencapaian sasaran strategis-6 pada Tahun 2018 di atas untuk 2 kegiatan sama dengan pencapaian pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%, namun ada satu kegiatan yang pada tahun 2017 tidak melaksanakan karena tidak menganggarkan yaitu kegiatan Glady penanggulangan Bencana.

Sasaran 7. Peningkatan sistem pemulihan bencana

Tabel 17
Pencapaian Kinerja Sasaran 7

ndikator kinerja	Satu an	Target Renstra	Target RPJMD 2017	Tahun 2016		Tahun 2017			Koordinator
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Dokumen Teknis Rehab Rekon	Dok	10	1	5	5	1	1	100	Bidang Rehab & rekon
2 Dokumen Perhitungan Kerusakan dan kerugian	Dok	6	1	1	1	1	1	100	Bidang Rehab & rekon
3 Terlaksananya Koordinasi Pendampingan bagi korban bencana (Trauma Healing)	keg	8	1	0	0	1	1	100	Bidang Rehab & rekon
4 Terlaksananya Pengembangan cooperate Sicial responcibility /CSR(perusahaan kepedulian social pasca bencana	Pers hn	180	30	0	0	30	30	100	Bidang Rehab & rekon

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-7, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun

2018, terdapat 1 buah program dan 4 buah kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Teknis Rehab dan Rekon pasca Bencana, Perhitungan Kerusakan dan Kerugian (dala) akibat bencana, Pendampingan Bagi korban Bencana alam (Trauma Hearling), Pengembangan Coorporate social Responbility (perusahaan kepedulian sosial) Pasca bencana.

Pencapaian sasaran strategis-7 pada Tahun 2018 di atas untuk 2 kegiatan sama dengan pencapaian pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%, namun ada dua kegiatan yang pada tahun 2016 tidak melaksanakan karena tidak menganggarkan yaitu kegiatan Pendampingan Bagi korban Bencana alam (Trauma Hearling), Pengembangan Coorporate social Responbility (perusahaan kepedulian sosial) Pasca bencana

Berdasar uraian tersebut diatas, capaian kinerja kegiatan pada 7 (tujuh) sasaran mencapai nilai 100%, dengan predikat semua Amat Baik.

Berikut capaian kinerja kegiatan per sasaran :

Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-1 adalah:

- a). Paradigma baru penyelenggaraan penanggulangan bencana belum dipahami sepenuhnya oleh aparaturnya pemerintah daerah, sehingga pemahaman seluruh program dan kegiatan pembangunan di daerah belum menyertakan konsep pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya.
- b). Paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana masih didominasi pada saat tanggap darurat bencana.
- c). Konsep pengurangan risiko bencana belum tersosialisasi secara utuh pada penyelenggara pembangunan di tingkat daerah.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana utamanya dalam memasukkan konsep pengurangan risiko bencana dalam pembangunan
2. melibatkan peran aparatur yang paling rendah secara teritorial seperti kecamatan dan kelurahan/desa untuk melakukan pengurangan risiko bencana dari basis yang paling rendah dimulai dari tingkat desa/kelurahan atau RT/RW apabila perlu.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-2 , diantaranya adalah :

- a).Terbatasnya sumber daya manusia aparatur dan relawan yang memiliki kualifikasi standar dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi.
- b).Keberadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum standar dan ideal.
- c).Belum semua para relawan dan aparatur /FPRB dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan operasionalisasi peralatan kebencanaan.
- d).Forum peduli bencana belum seluruhnya dapat diidentifikasi oleh BPBD Kabupaten Boyolali;
- e).Masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur dalam mengoperasikan peralatan penanggulangan bencana.
- f). Belum semua forum-forum peduli bencana terlibat pendampingan secara aktif dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten Boyolali.
- g).Masih terbatasnya sarana evakuasi / sarana Penunjang Penanggulangan Bencana :
 - *. Tahun 2018 baru diselenggarakan MOU sister Village (desa bersaudara);
 - *. Baru dibuat peta rawan bencana gunung merapi;
 - *. Peta rawan bencana yang disusun jumlahnya masih sangat terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh bencana yang berada di Kabupaten Boyolali, serta belum melibatkan komunitas kebencanaan yang berada di wilayah masing-masing.
 - *. RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) baru dibuat Tahun 2018.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dan relawan yang memiliki kualifikasi standar dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi dengan melakukan/mengirimkan diklat maupun pelatihan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana menjadi perlengkapan yang standar dan ideal.
3. Melakukan identifikasi terhadap forum dan komunitas peduli bencana di seluruh Kabupaten Boyolali.
4. Membekali para relawan dan aparaturnya dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan operasionalisasi peralatan kebencanaan.
5. Mendorong keterlibatan forum-forum peduli bencana agar terlibat pendampingan secara aktif dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten Boyolali.
6. Membekali para relawan dan aparaturnya /FPRB dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan operasionalisasi peralatan kebencanaan.
7. Meningkatkan sarana evakuasi / sarana penunjang Penanggulangan Bencana :

- *. Meningkatkan penyelenggaraan MOU sister Village;

- *. Meningkatkan pembuatan peta rawan bencana yang berada di Kabupaten Boyolali, dengan melibatkan komunitas kebencanaan agar secara aktif turut membantu penyusunan di masing-masing wilayah;

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-3 , diantaranya adalah :

- a). Pemadam kebakaran belum bisa menjangkau ke semua wilayah Kabupaten Boyolali;
- b). Medan terlalu jauh dan terjal;
- c). Belum ditetapkannya wilayah Manajemen Kebakaran dengan peraturan perundang-undangan ;
- d). Terbatasnya personil BPBD untuk siaga.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Diadakannya/ dibukanya Pos Pemadam Kebakaran setiap Kecamatan;
2. Ditetapkannya Wilayah Manajemen Kebakaran dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Mengangkat pegawai Tetap untuk siaga jaga posko.

Dalam rangka mencapai peningkatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik, Kabupaten Boyolali melalui 3 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Kegiatan Kegiatan Perhitungan dan kerusakan (DALA);

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-4, diantaranya adalah :

- a. Aparatur penanggulangan bencana di Kabupaten Boyolali sering terjadi mutasi dan pergantian personil, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Masih terbatasnya petugas BPBD yang bisa menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana

Berikut ini adalah uraian secara singkat mengenai upaya yang dilakukan terkait dengan pencapaian sasaran strategis-1, yaitu : Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar;
- a. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur di Kab/Kota se-Jawa Tengah;
- b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kebencanaan;
- c. Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
- d. Kegiatan Pengembangan Pusdalops Tanggap Darurat/SAR;
- b. Kegiatan Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana;
- d. Kegiatan Pengembangan Desa Siaga Bencana;
- e. Kegiatan Gladi Manajemen Bencana;
- f. Kegiatan Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana;
- g. Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat;
- h. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana;
- i. Kegiatan Pelatihan Teknis Damage and Losses Assessment (DaLA);

- j. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana;
- l. Kegiatan Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana;
- m. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana;
- n. Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis -1 , diantaranya adalah :

- a). Belum terusunnya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengakibatkan belum sinkron dan padunya program dan kegiatan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh SKPD terkait di Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini beberapa SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah yang telah masuk dalam draft Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pendidikan dan SKPD yan lain
- b). Belum adanya pemahaman yang komprehensif oleh aparatur tentang pepaduserasian penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, karena selama ini penyelenggaraan penanggulangan bencana masih dipahami hanya penyelenggaraan pada saat tanggap darurat.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang arti penting pepaduserasian dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2. Segera menyelesaikan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir Tahun 2012, sehingga pada Tahun 2013 sudah dapat diimplementasikan.
- 1. Kegiatan Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana.
- 2. Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat.
- 3. Kegiatan Pelatihan Teknis Damage and Losses Assessment (DaLA).
- 4. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana.
- 5. Kegiatan Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana.
- 6. Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis -2, diantaranya adalah :

- a). Belum selesainya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengakibatkan belum sinkron dan padunya program dan kegiatan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh SKPD terkait di Provinsi Jawa Tengah.
- b). Masih lemahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah .

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Segera menyelesaikan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir Tahun 2012, sehingga pada Tahun 2013 sudah dapat diimplementasikan.
2. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah misalnya dalam bentuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-2 , diantaranya adalah :

8. Terbatasnya sumber daya manusia aparaturnya dan relawan yang memiliki kualifikasi standar dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi.
9. Keberadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum ideal.
10. Masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparaturnya dalam mengoperasikan peralatan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

11. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dan relawan yang memiliki kualifikasi standar dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi dengan melakukan/mengirimkan diklat maupun pelatihan.
12. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana menjadi perlengkapan yang standar dan ideal.
13. Membekali para relawan dan aparaturnya dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan operasionalisasi peralatan kebencanaan.

Dalam rangka mencapai peningkatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik, Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan 4 buah kegiatan yaitu:

- d. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur di Kab/Kota se-Jawa Tengah;
- e. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana;
- f. Kegiatan Pelatihan Teknis Damage and Loss Assessment (DaLA), dan;
- g. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-3, diantaranya adalah :

- c. Aparaturnya penanggulangan bencana di daerah Kabupaten/Kota sering terjadi mutasi dan pergantian personil, sehingga mengakibatkan kelutidan dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Masih adanya beberapa BPBD Kabupaten/Kota yang kehadirannya dalam setiap kegiatan diwakili dari unsur Badan/Kantor Kesbangpolinmas.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melakukan penegasan kepada Kabupaten/Kota agar personil yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan adalah personil yang benar-benar berasal dari BPBD Kabupaten/Kota.
2. Memberikan inisiasi kepada BPBD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi yang berlebihan yang berakibat pada penurunan efektifitas dan efisiensi kinerja personilnya.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-1 , diantaranya adalah :

- a. Belum seluruh pelajar dan masyarkaat yang tinggal di daerah rawan bencana dapat mengikuti pelatihan/simulasi ini.
- b. Simulasi masih terbatas dilaksanakan di daerah yang merupakan daerah super rawan bencana dengan *single hazard* (satu ancaman).

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melakukan usulan penambahan anggaran, agar pelaksanaan simulasi dapat diikuti lebih banyak peserta terutama bagi masyarkaat dan pelajar yang tinggal di daerah siper rawan bencana.
2. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, perlu mengajak keterlibatan Dunia Usaha melalui anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)*, agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan simulasi ini, baik keterlibatan anggaran, personil maupun sumber daya lainnya.
3. Simulasi perlu dilakukan dalam konteks *multy hazard* (banyak ancaman), sehingga peserta nantinya benar-benar terlatih dan mampu mengurangi dampak atau risiko yang timbul akibat bencana.

b. Sasaran Strategis - 2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	%	% Capaian Tahun Sebeluny a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya komunitas peduli bencana	Jumlah Desa Siaga yang terbentuk	11 Desa	11 Desa	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran staregis 2					100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-2, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan dalam upaya mewujudkan komunitas peduli bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian sasaran strategis-2 pada Tahun 2011 di atas sesungguhnya sama dengan pencapaian pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%. Untuk mencapai target kinerja sasaran ini ditempuh melalui 1 program pembangunan yaitu Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berikut ini adalah uraian secara singkat mengenai upaya yang dilakukan terkait dengan pencapaian sasaran strategis-2, yaitu : Terwujudnya komunitas peduli bencana, sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan komunitas peduli bencana di Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan 1 buah kegiatan yaitu: Kegiatan Pengembangan Desa Siaga Bencana. Kegiatan ini adalah memberikan pembekalan dan pelatihan kepada penduduk/masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat secara sigap, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana terutama pada saat terjadi tanggap darurat bencana.

Pelatihan ataupun pembekalan yang dilakukan meliputi pembekalan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, pada saat bencana dan pada saat pasca terjadinya bencana. Pada saat pra bencana, pelatihan lebih diupayakan pada pemberian pemahaman dan pembekalan dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Desa dan Rencana Aksi Desa Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Sementara pada saat terjadi bencana (tangap darurat, masyarakat diberikan pembekalan terkait bagaimana harus menyelamatkan diri dan mampu hidup secara baik di tempat pengungsian. Sedangkan pada saat pasca terjadi bencana masyarakat dibekali bagaimana harus meulihkan kondisi fisik, mental dan spiritual termasuk bagaimana pengembangan ekonomi produktif pasca terjadinya bencana.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-2 , diantaranya adalah :

- a. Forum peduli bencana belum seluhnya dapat diidentifikasi oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam forum-forum peduli bencana utamanya dalam pembentukan desa siaga bencana difatnya masih sangat terbatas.
- c. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun rencana penanggulangan bencana maupun rencana aksi desa pengurangan risiko bencana.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- 1. Melakukan identifikais terhadap forum dan komunitas peduli bencana di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Mendorong-keterlibatan forum-forum peduli bencana agar terlibat pendampingan secara aktif dalam proses pembentukan desa siaga bencana di Jawa Tengah.
- 3. Memberikan pelatihan kepada anggota forum-forum tersebut agar mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat secara optimal.

c. Sasaran Strategis - 3 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya partisipasi	Jumlah relawan SAR dan aparatur	135 orang	135 orang	100%	100%

	masyarakat dalam penanggulangan bencana	yang terlatih dalam penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi				
Rata-rata capaian sasaran staregis 3					100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-3, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian sasaran strategis-3 pada Tahun 2011 di atas pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%. Berikut ini adalah uraian secara singkat mengenai upaya yang dilakukan terkait dengan pencapaian sasaran strategis-3, yaitu : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan 1 buah kegiatan yaitu: Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi.

Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-3, diantaranya adalah Bintek belum dapat melibatkan seluruh komponen penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota terutama para relawannya. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi untuk melibatkan dunia usaha untuk membantu pembiayaan bintek sehingga mampu melibatkan lebih banyak unsur dari masyarakat.

d. Sasaran Strategis - 4 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-4, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah aparatur, relawan dan masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana terutama pada saat tanggap darurat bencana	90 orang	90 orang	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran staregis 4					100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-4, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan dalam upaya mewujudkan interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian sasaran strategis-4 pada Tahun 2011 di atas pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%. Berikut ini adalah uraian secara singkat mengenai upaya yang dilakukan terkait dengan pencapaian sasaran strategis-4, yaitu : Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana, sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana, Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan 1 buah kegiatan yaitu: Kegiatan Gladi Manajemen Bencana.

Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis -4 di atas, diantaranya adalah:

- a. Gladi manajemen tidak diikuti dengan terselenggaranya gladi lapang bencana, karena keterbatasan anggaran, idealnya setelah gladi manajemen dilakukan gladi lapang bencana, sehingga terdapat alur yang jelas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- b. Gladi belum dapat melibatkan seluruh komponen penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota terutama para relawannya.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi untuk melibatkan dunia usaha untuk membantu pembiayaan gladi sehingga mampu melibatkan lebih banyak unsur dari masyarakat dan dapat ditindaklanjuti dengan gladi lapang bencana.

Tujuan 5 : Mendorong Semangat Gotong Royong, Kesetiakawanan, dan Kedermawanan

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis - 1:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat sadar bencana yang tinggal di daerah rawan bencana	75 orang	75 orang	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran staregis 1					100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-1, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian sasaran strategis-1 pada Tahun 2011 di atas pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%. Berikut ini adalah uraian secara singkat mengenai upaya yang dilakukan terkait dengan

pencapaian sasaran strategis-1, yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana, sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana, Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan 1 buah kegiatan yaitu: Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana.

Salah satu hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-1 adalah kegiatan ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat di Jawa Tengah yang tinggal di daerah rawan bencana. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi untuk melibatkan secara aktif relawan dan SAR serta aparaturnya pemerintah Kabupaten/Kota untuk secara proaktif dan responsif mendatangi desa-desa rawan bencana untuk memberikan penyadaran tentang kebencanaan.

b. Sasaran Strategis - 2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Berkembangnya kearifan lokal dalam penanggulangan bencana	Jumlah relawan dan aparaturnya pemerintah yang memiliki kemampuan profesional dalam penanganan bencana terutama dalam Tim Reaksi Cepat (TRC)	50 orang	50 orang	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran stategis 2					100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-2, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 di atas, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan dalam upaya mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian sasaran strategis-2 pada Tahun 2011 di atas pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%. Berikut ini adalah uraian secara singkat mengenai upaya yang dilakukan terkait dengan pencapaian sasaran strategis-2, yaitu: Berkembangnya kearifan lokal dalam penanggulangan bencana, sebagai berikut :

Dalam rangka mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan 1 buah kegiatan yaitu: Kegiatan Pengembangan Pusdalops Tanggap Darurat/SAR.

- Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis 2 adalah:
- a. Kearifan lokal yang berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah di Jawa Tengah belum dimasukkan dalam pengembangan sistem Pusdalops.
 - b. Masyarakat dan dunia usaha belum terlibat dalam pengembangan Pusdalops di Jawa Tengah.

- c. Belum adanya *link* antara Pusdalops Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh BPBD di Kabupaten/Kota karena baru Kabupaten Cilacap yang memilikinya.
- d. masih belum lengkapnya sarana dan prasarana Pusdalops secara ideal.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Mengundang masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan Pusdalops di Jawa Tengah.
2. Memasukkan unsur kearifan lokal dalam pengembangan sistem di Pusdalops Jawa Tengah.
3. Melakukan akselerasi kepada Kabupaten/Kota untuk segera membentuk Pusdalops di masing-masing BPBD-nya.
4. Melengkapii perlengkapan Pusdalops sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Tujuan 6 : Mengembangkan Budaya Sadar Bencana dalam Masyarakat

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 buah sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis - 1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terfasilitasinya kerjasama antar kelompok masyarakat dan lembaga peduli bencana	Jumlah dokumen penanganan darurat bencana di Jawa Tengah	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran staregis 1					100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis-1, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan dalam upaya memfasilitasi kerjasama antar kelompok masyarakat dan lembaga peduli bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian sasaran strategis-1 pada Tahun 2011 pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%. Berikut ini adalah uraian secara singkat mengenai upaya yang dilakukan terkait dengan pencapaian sasaran strategis-1, yaitu: Terfasilitasinya kerjasama antar kelompok masyarakat dan lembaga peduli bencana, sebagai berikut :

Dalam rangka memfasilitasi kerjasama antar kelompok masyarakat dan lembaga peduli bencana di Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan 1 buah kegiatan yaitu: Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat.

Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis-1 adalah:

- a. Penyusunan pedoman penanganan darurat di Jawa Tengah belum dapat dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota karena masih terdapat 10 Kabupaten/Kota yang belum membentuk BPBD dengan Peraturan Daerah.
- b. Kelompok masyarakat dan lembaga peduli bencana belum seluruhnya terlibat dalam penyusunan pedoman penanganan darurat di Kabupaten/Kota

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh kelompok masyarakat dan lembaga peduli bencana untuk secara aktif terlibat dalam penyusunan pedoman penanganan darurat di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokalnya masing-masing.
2. Melakukan akselerasi atau percepatan kepada Kabupaten/kota yang masing membentuk BPBD dengan Peraturan Bupati/Walikota untuk segera membentuk dengan Peraturan Daerah.

b. Sasaran Strategis - 2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Berkembangnya komunitas pendidikan kebencanaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang disusun dalam peta risiko bencana banjir dan abrasi	7 Kabupaten	7 Kabupaten	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran stategis 2					100%	100%

Tujuan 7 : Terjalinnya Kerjasama dengan Media Massa dan Dunia Usaha

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 buah sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

o. Sasaran Strategis:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terjalannya kerjasama dengan media massa dan Dunia Usaha	Jumlah publikasi kebencanaan kepada masyarakat	1 Tahun melalui media TV, Radio dan Koran	Tahun melalui media TV, Radio dan Koran	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran stategis					100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis di atas, tergambar bahwa realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja SKPD Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, terdapat 1 buah program dan 1 buah kegiatan dalam upaya menjalin kerjasama dengan media massa dan Dunia Usaha di Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2011 di atas pada prinsipnya sama dengan pencapaian pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja yang sama-sama mencapai 100%. Berikut ini adalah uraian secara singkat mengenai upaya yang dilakukan terkait dengan pencapaian sasaran strategis di atas, yaitu : Terjalannya kerjasama dengan media massa dan Dunia Usaha, sebagai berikut:

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan media massa dan Dunia Usaha di Jawa Tengah, Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan 1 buah kegiatan yaitu: Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama antara BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan media massa terkait dengan penyebaran informasi kebencanaan melalui media massa (TV, koran dan Radio) dan leadlet. Selama tahun 2011 telah tersebar informasi kebencanaan ke seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Informasi kebencanaan ini berupa informasi penting terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan

oleh masyarakat yaitu pada saat pra bencana (sebelum terjadi bencana) dengan mencegah dan mengurangi dampak dan risiko bencana, pada saat tanggap darurat (dengan menghindari dan menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana), dan pada saat pasca terjadi bencana (dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi).

Salah satu hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis tersebut adalah dunia usaha belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan ini. Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi untuk melibatkan peran dunia usaha dalam rangka penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat di seluruh kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

	2.	Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana	99,92%
	3	Kegiatan Pengembangan Desa Siaga Bencana	98,50%
	4	Kegiatan Gladi Manajemen dan Gladi Lapangan Kebencanaan	99,80%
	5	Kegiatan Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana	99,63%
	6	Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat	99,77%
	7	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana	99,10%
	8	Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment	99,88%
	9	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	99,70%
	10	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana	100%
	11	Kegiatan Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana	99,25%
	12	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah	96,83%

